

EVALUASI TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN WONOSOBO (STUDI KASUS TRAYEK WONOSOBO-KERTEK)

**Ni Made Intan
Febriani**

Taruna Program Studi
Diploma III Manajemen
Transportasi Jalan
PTDI – STTD
Jl. Raya Setu No. 89,
Cibuntu, Cibitung,
Bekasi, 17520
085829631056
Intanfebriani0102@gmail.com

**Adithya Prayoga
Saifudin**

Dosen Politeknik
Transportasi Darat
Indonesia – STTD
Jl. Raya Setu No. 89,
Cibuntu, Cibitung, Bekasi,
17520

Bambang Istianto

Dosen Politeknik
Transportasi Darat
Indonesia – STTD
Jl. Raya Setu No. 89,
Cibuntu, Cibitung, Bekasi,
17520

Abstract

In the operation of rural transportation, it's necessary to determine tariffs for service users. A good tariff setting must be adjusted from three perspectives, both from the operator side (related to the costs incurred for the operation of public transportation), the user side (related to the ability and willingness of service users to pay the cost of public transportation services) and the regulator side (the government related to public policies for the community). The method used in this study is a calculation based on Vehicle Operational Costs (VOC) to find the appropriate tariff from the operator's perspective, calculations based on Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP) to find out the appropriate tariff from user side (service users). Based on the analysis that has been done, the Vehicle Operational Costs value is between the Ability to pay and Willingness to Pay values, Vehicle Operational Costs is Rp 3.722, Ability to Pay is Rp 3.765 and Willingness to Pay is Rp 3.112.

Keywords : public transportation; rates; VOC; ATP; WTP

Abstrak

Dalam penyelenggaraan operasional angkutan pedesaan diperlukan penetapan tarif untuk pengguna jasa. Penetapan tarif yang baik harus disesuaikan dari tiga sudut pandang, baik sisi operator (terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan angkutan umum), sisi user (terkait dengan kemampuan dan kemauan pengguna jasa untuk membayar biaya jasa angkutan umum) dan sisi regulator (pemerintah terkait dengan kebijakan untuk masyarakat). Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu perhitungan berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk mengetahui tarif yang sesuai dari segi operator, perhitungan berdasarkan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) untuk mengetahui berapa tarif yang sesuai dari sisi user (pengguna jasa). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapat nilai BOK berada diantara nilai ATP dan WTP dimana BOK sebesar Rp 3.722, ATP sebesar Rp 3.765 dan WTP sebesar Rp 3.112 dapat dikatakan tarif BOK dapat dijadikan tarif ideal untuk Trayek Wonosobo-Kertek.

Kata kunci : Angkutan umum; Tarif; BOK; ATP; WTP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan kabupaten yang tidak termasuk dalam Trayek Angkutan Perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum (PM No Tahun 2019). Angkutan Pedesaan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor.551.2/128/2010 memiliki 36 Trayek namun pada kondisi eksisting terdapat 21 trayek yang beroperasi. Penyelenggaraan operasional angkutan pedesaan membutuhkan penanganan dan kebijakan terhadap besaran tarif angkutan. Di Kabupaten Wonosobo belum dilakukan penetapan tarif oleh pemerintah, operator menetapkan tarif sebesar Rp 5.000 untuk umum dan Rp. 2.000 untuk pelajar. Perbedaan tarif diakibatkan karena naiknya harga-harga barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan angkutan umum seperti bahan bakar minyak (BBM), suku cadang, Oli, dan sebagainya. Hal tersebut dapat mengakibatkan konflik antara operator dengan user (pengguna jasa) dimana masyarakat yang menjadi pengguna jasa tentunya menginginkan tarif serendah-rendahnya, sebaliknya pihak operator menginginkan tarif yang setinggi-tingginya agar mendapatkan keuntungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada kondisi eksisting, rumusan masalah penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting perbandingan antara tarif eksisting dengan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)?
2. Bagaimana Kondisi perbandingan antara tarif eksisting dengan tarif yang dilihat dari sisi user berdasarkan Ability To pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)?
3. Bagaimana hasil evaluasi tarif yang ideal untuk angkutan pedesaan Kabupaten Wonosobo?

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap evaluasi tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Wonosobo

1. Mengidentifikasi tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi operator

2. Mengidentifikasi tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi user (Pengguna jasa)
3. Memberikan tarif yang ideal untuk angkutan pedesaan Kabupaten Wonosobo

Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai:

1. Penelitian ini hanya membahas trayek Wonosobo-Kertek yang memiliki *Load Factor* sebesar 51%
2. Penelitian ini hanya menganalisis tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan, perhitungan tarif berdasarkan kemampuan membayar (*Ability To Pay*), keinginan untuk membayar (*Willingness To Pay*), dan kondisi tarif eksisting (dilapangan)
3. Penelitian ini hanya membandingkan tarif yang dilihat dari sisi operator, sisi user (pengguna jasa), dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah (regulator) dalam penentuan tarif angkutan pedesaan.

METODELOGI

Metodelogi penelitian ini dimulai dari tahap awal, identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data sekunder dan data primer, pengolahan analisis dan berdasarkan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan untuk mengetahui tarif yang sesuai dari sisi operator, perhitungan berdasarkan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) untuk mengetahui berapa tarif yang sesuai dari sisi user (pengguna jasa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan evaluasi tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Wonosobo, hal yang lebih dahulu yang harus dilakukan adalah perhitungan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (sisi operator) dengan perhitungan tarif menggunakan mekanisme perhitungan yang ada di dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP.792/AJ.205/DRJD/2021 tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Perkotaan Penumpang Umum Perkotaan dan perhitungan tarif berdasarkan ATP dan WTP (sisi pengguna jasa) yang didapatkan dari hasil survey wawancara penumpang angkutan pedesaan.

1. Perhitungan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Sisi Operator)

Tabel 1 Rekapitulasi BOK Pada Tiap Trayek

No.	Komponen Biaya	Rekapitulasi Biaya Per km
Biaya Langsung		
1	Biaya Investasi Armada	Rp 570
2	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Rp 1.184
3	Biaya Investasi Sistem Monitoring	-
4	Biaya Awak Kendaraan	Rp 488
5	Biaya Peningkatan Fasilitas Armada	-
6	Biaya Asuransi Penumpang	-
Biaya Tidak Langsung		
7	Biaya Pegawai kantor	-
8	Biaya Pengelolaan	Rp 4
9	Total Biaya per Km	Rp 2.246
10	Marga Laba (10%)	Rp 176
11	PPH (2%)	Rp 39
Total Rp/km		Rp 2.461

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel diatas didapatkan rekapitulasi BOK dari Trayek Wonosobo-Kertek. Data-data diatas digunakan sebagai dasar untuk perhitungan tarif dari sisi operator. Setelah dilakukan perhitungan tarif, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 Perhitungan Tarif

Trayek	Wonosobo-Kertek
Panjang Lintasan A-B	11 Km
Tarif Pokok/Pnp-Km	Rp 308
Tarif BEP	Rp 3.383
Tarif	Rp 3.722

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil untuk Trayek Wonosobo-Kertek dari sisi operator sebesar Rp 3.722.

2. Perhitungan tarif berdasarkan ATP dan WTP (Sisi User)

a. ATP

$$ATP = \frac{I \times \% \text{Biaya Transportasi}}{D \times y}$$

Keterangan:

I = Pendapatan per kapita

D = Jumlah hari kerja dalam satu bulan

Y = Trip Rate

$$ATP = \frac{Rp\ 1.882.622 \times 10\%}{20 \times 2,5}$$

$$ATP = Rp\ 3.765$$

Jadi ATP Trayek Wonosobo Kertek sebesar Rp 3.765

b. WTP

			WTP (Rupiah)				Total
			2000	3000	4000	5000	
PEKERJAAN	Pelajar/Mahasiswa	Jml	21	0	0	0	21
	PNS	Jml	0	0	18	5	23
	IRT	Jml	2	33	1	0	36
	Swasta	Jml	0	57	4	0	61
	Pedagang	Jml	0	29	2	0	31
Total		Jml	23	119	25	5	172

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui karakteristik penumpang Trayek Wonosobo Kertek berdasarkan WTP sesuai pekerjaan sebagai berikut:

a. WTP rata-rata untuk pelajar/mahasiswa

$$\frac{21 \times 2000}{21} = Rp\ 2.000$$

b. WTP rata-rata untuk PNS

$$\frac{(14 \times 4000) + (9 \times 5000)}{23} = Rp\ 4.391$$

c. WTP rata-rata untuk Ibu Rumah Tangga

$$\frac{(2 \times 2000) + (33 \times 3000) + (1 \times 4000)}{36} = \text{Rp } 2.972$$

d. WTP rata-rata untuk Swasta

$$\frac{(57 \times 3000) + (4 \times 4000)}{61} = \text{Rp } 3.066$$

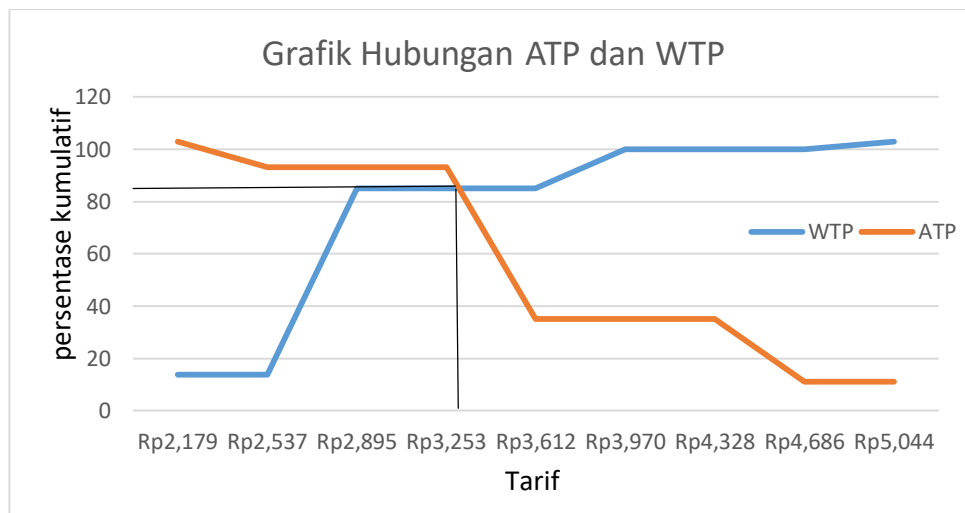
e. WTP rata-rata untuk Pedagang

$$\frac{(29 \times 3000) + (2 \times 4000)}{31} = \text{Rp } 3.129$$

Dengan demikian rata-rata WTP Trayek Wonosobo Kertek adalah

$$\frac{\text{Rp } 2.000 + \text{Rp } 4.391 + \text{Rp } 2.972 + \text{Rp } 3.066 + \text{Rp } 3.129}{5} = \text{Rp } 3.112$$

Grafik hubungan ATP dan WTP dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Hasil Analisis 2022

Gambar 1 Grafik Hubungan ATP dan WTP

Perpotongan pada grafik menunjukkan tingkat keseimbangan tarif bagi responden yang mampu dan bersedia membayar tarif angkutan, dimana pada grafik titik potong berada pada tarif Rp 3.253 dengan persentase kumulatif sebesar 83%.

3. Penentuan Tarif berdasarkan BOK, ATP dan WTP

Tabel 3 Rekap Data tarif

Trayek	Wonosobo-Kertek
Tarif Eksisting	Rp 5.000
BOK	Rp 3.722
ATP	Rp 3.765
WTP	Rp 3.112

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan data diatas didapat hasil perbandingan antara tarif eksisting dengan tarif dari sisi operator dan user. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi tarif eksisting terhadap BOK, Tarif ATP dan WTP. Pada hasil analisis dapat diketahui Tarif Biaya Operasional Kendaraan terletak diantara tarif ATP dan WTP. Selain itu nilai ATP lebih besar daripada nilai WTP itu menunjukkan bahwa kebanyakan penumpang adalah kelompok *choiced riders* yang mana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya mempunyai pilihan

Tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Wonosobo ditetapkan oleh ORGANDA yaitu sebesar Rp 5.000 dimana penetapan ini dilakukan oleh operator secara sepihak dikarenakan belum tersedianya Surat Keputusan oleh pemerintah terkait dengan tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Wonsobo

Untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan tarif angkutan Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan penetapan tarif yang disepakati harus berdasarkan *good governance* dimana pihak pemerintah harus bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan masyarakat sehingga seluruh lembaga dan aparat yang dibawahnya mampu mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu keputusan penetapan tarif akan bersifat transparan dan akuntability.

KESIMPULAN

kesimpulan dari evaluasi tarif angkutan pedesaan Kabupaten Wonosobo Trayek Wonosobo Kertek sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tarif eksisting sebesar Rp 5.000, tarif ini lebih besar dibandingkan dengan tarif BOK. Sesuai perhitungan Biaya Operasional Kendaraan tarif untuk Trayek Wonosobo-Kertek sebesar Rp 3.722
2. Berdasarkan anlisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi user (pengguna jasa) sesuai perhitungan tarif dengan ATP dan WTP diperoleh hasil untuk Trayek Wonosobo-Kertek, berdasarkan kemampuan membayar (ATP) sebesar Rp 3.765 dan berdasarkan kemauan membayar (WTP) sebesar Rp 3.112 sedangkan tarif eksistings sebesar Rp 5.000

3. Berdasarkan analisis tarif yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut;
 - a. Segi operator berdasarkan KP.792/AJ.206/DRJD/2021 tarif BOK sebesar : Rp 3.722
 - b. Segi pengguna berdasarkan ATP dan WTP
 - 1) Tarif ATP sebesar : Rp 3.765
 - 2) Tarif WTP sebesar : Rp 3.112
 - 3) Tarif equilibrium sebesar : Rp 3.253

Dapat dikatakan bahwa kemampuan membayar jasa angkutan oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo lebih besar dari kesediaan membayar. Selain itu dikarenakan tarif yang berlaku lebih besar daripada tarif BOK, ATP dan WTP maka perlu diadakan peningkatan pelayanan akan jasa angkutan umum sehingga menarik minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum.

Saran

1. Evaluasi tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Wonosobo diharapkan dilakukan dengan segera dalam Forum LLAJ agar dapat menetapkan tarif yang sesuai dan seimbang bagi ketiga sisi (operator, user dan regulator)
2. Diadakan evaluasi terkait pelayanan agar meningkatkan minat pengguna angkutan umum serta mampu mengimbangi kemampuan membayar (ATP) maupun kesediaan membayar (WTP) dari sisi user (pengguna jasa)
3. Pengambilan kebijakan oleh pemerintah bila terdapat penyimpangan terhadap tarif yang telah ditetapkan dengan cara pembekuan izin trayek sampai dengan pencabutan izin trayek.

REFERENSI

- Departemen Perhubungan RI. (2021). Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat, KP.792/AJ.206/DRJD/2021
- Dwitasari, R. (2019). Kemampuan dan kemauan membayar (ATP-WTP) calon pengguna angkutan umum light rail transit (LRT) di Yogyakarta. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 16(2), 101-110.

- Kelompok PKL Kabupaten, 2021, Laporan Umum Taruna Sekolah Tinggi transportasi Darat Program D III Ahli LLAJ, *Pola Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo*, Bekasi.
- Suryoputro, J., Sumarsono, A., & Djumari. (2015). Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP) Dan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) (Studi Kasus Trans Jogja Rute 4A dan 4B). *E-Jurnal Matriks Teknik Sipil*, 3(2), 586–592.
- Tamin, O. Z., Rahman, H., Kusumawati, A., Munandar, A. S., & Setiadji, B. H. (1999). ' Ability To Pay ' (Atp) Dan ' Willingnes To Pay ' (Wtp). *Jurnal Transportasi, Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT)*, 1(2), 121–139.